



Bab 2

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagai suatu instansi, pemerintah Kota Kendari mempunyai Kebijakan dan rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang (RPJM), yang merupakan aspirasi dan komitmen seluruh *stakeholders* pembangunan Kota Kendari.

A. Visi dan Misi

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Oleh sebab itu kemampuan dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada setiap daerah akan merupakan faktor kunci sukses dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Kendari merupakan salah satu daerah yang harus berbenah diri guna penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut dan juga tuntutan perkembangan saat ini. Ada beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka antara lain :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Terwujudnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.



3. Mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional.
4. Kemampuan merumuskan pilihan berdasarkan prioritas, tujuan (alternatif) dan sasaran, menemukan kendali permasalahan dan merumuskan tujuan serta menetapkan sasaran secara tepat dalam mengembangkannya.

Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

A. Visi

Menyikapi tuntutan tetap tegaknya semangat reformasi, maka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kota Kendari dilaksanakan dengan bertumpu pada prinsip-prinsip demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pendekatan pengelolaan yang strategis antara permasalahan internal dan tantangan eksternal bagi Kota Kendari, diperlukan suatu cara pandang bersama para pengelola kebijaksanaan



maupun pelaku pembangunan Kota (*stakeholders*) bagi masa depan Kota Kendari, dalam suatu Visi, Misi dan Strategi (Vimistra) Pembangunan Kota Kendari.

Berdasarkan kondisi umum yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan Kota maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional maupun global, maka Visi Kota Kendari disepakati sebagai berikut :

“Mewujudkan Kendari Tahun 2020 sebagai kota dalam taman yang maju, demokratis dan sejahtera”

Sedangkan Visi Walikota dan Walikota terpilih **Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musaddar Mappasomba,SP, MP** adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Kendari yang Berakhlak, Adil, Demokratis, Maju dan Sejahtera”**.

Orientasi visi Kota Kendari merupakan perpaduan antara paradigma pembangunan kota yang berkelanjutan, dimana terjadi keselarasan antara *alam, manusia dan kebudayaan* dengan kebanggaan dan harapan masyarakat Kota Kendari.

“Kota dalam taman, adalah ungkapan yang merefleksikan sekaligus mengabadikan kebanggaan, potensi dan kekhasan Kota Kendari, yakni “hutan dan teluk” yang laksana “sabuk hijau” (*green belt*) melingkari Kota Kendari. Eksistensi “sabuk hijau” tersebut bukan saja menjadi jati diri kota, tetapi sekaligus memiliki fungsi-fungsi yang integratif (satu kesatuan), yang secara fisik maupun sosial ekonomi memberikan jaminan keberlanjutan (*sustainable*) Kota Kendari.



M i s i

Untuk mewujudkan Visi Kota Kendari sebagaimana diuraikan di atas perlu ditetapkan langkah-langkah yang lebih konkrit sebagai penjabarannya. Berdasarkan makna dari kata-kata yang membentuk visi, maka ditetapkan misi yang harus di emban meliputi :

1. Misi lingkungan

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas, keseimbangan dan keserasian lingkungan kota yang indah, sejuk, sehat dan lestari.

2. Misi Sosial kemasyarakatan

Mendukung penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang agamis, aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.

3. Misi Pelayanan

Mengembangkan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, dan transparan, terjangkau (layak harga), mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

4. Misi Perekonomian

Mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi sesuai potensi daerah.

5. Misi Profesionalisme Aparat

Mengembangkan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan.

6. Misi Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokrasi, berwibawa dan bertanggung jawab.



B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH (SESUAI RPJMD)

a. Isu Pokok Pembangunan

Sebelum melangkah terlalu jauh untuk merumuskan tujuan dan strategi kebijakan pembangunan, maka terlebih dahulu harus dipahami beberapa isu pokok pembangunan di Kota Kendari. Isu-isu pokok tersebut di antaranya adalah :

1) Terbatasnya prasarana dasar perkotaan

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari 2000 - 2010 disebutkan bahwa Kota Kendari berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota (PWK) di wilayah Sulawesi Tenggara, sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, pusat kegiatan perekonomian dan pintu gerbang perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pariwisata. Hingga saat ini secara signifikan baru dapat melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pusat pemerintahan (Ibukota) Propinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai pusat pendidikan.

Sementara itu, berdasarkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari diarahkan sebagai pusat kota orde pertama, yakni menempati posisi paling tinggi dalam hirarki kota-kota di Sulawesi Tenggara, dengan dasar pengembangan "Kota Dalam Taman" sebagai wujud integrasi pertimbangan lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara harapan fungsi Kota Kendari dan kondisi aktualnya, salah satunya disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana perkotaan. Ke depan diharapkan penataan sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan agar masyarakat Kota Kendari semakin memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka.



2) Kerusakan Lingkungan

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup selalu menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menjaga eksistensinya sebagai citra ibukota, untuk itu perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup, namun beberapa permasalahan pokok yang terjadi adalah adanya kerusakan lingkungan antara lain :

- a. Teluk Kendari yang menjadi penciri (*land mark*) kota terus mengalami pendangkalan akibat erosi serta tingkat pencemaran akibat limbah industri dan limbah rumah tangga dimana pembuangannya langsung mengarah ke Teluk Kendari.
- b. Terjadinya penggundulan Hutan Nipa-Nipa dan Hutan Nanga-Nanga akibat perambahan hutan semakin memperparah tingkat erosi dan pencemaran.
- c. Adanya masyarakat yang membangun dengan cara membongkar gunung sebagai material timbunan.
- d. Rendahnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kurangnya kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Kendari Kota yang bersih, indah dan tertib; hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sampah disaluran drainase dan sungai yang ada dalam wilayah kota, dimana sungai-sungai ini bermuara langsung ke teluk kendari.
- f. Terdapat sebuah sungai besar yang bermuara di Teluk Kendari yakni sungai Wanggu, dimana sungai ini pada saat banjir membawa sedimentasi cukup besar karena aliran sungai ini melintasi dua wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, sehingga dalam penanganan DAS Wanggu perlu koordinasi lintas wilayah.



- g. Kurang efektifnya program pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- h. Kurangnya program-program yang signifikan untuk mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kelestarian lingkungan hidup.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan

Permasalahan kualitas kesehatan masyarakat Kota Kendari untuk beberapa indikator masih membutuhkan penanganan yang optimal diantaranya :

- a. angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kendari dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 masih berada di bawah standar pencapaian visi Indonesia Sehat 2010, yakni 40 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa AKB pada tahun 2001 adalah 11 orang dari sasaran 4782 kelahiran bayi dan pada tahun 2002 turun menjadi 7 orang dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan kembali menjadi 24 orang. Meskipun demikian, fluktuasi AKB tersebut masih perlu mendapat perhatian. Angka Kematian Bayi (Neonatal) mengalami kenaikan yaitu 14 orang (2001), 17 orang (2002) dan 24 orang (2003), selanjutnya mengalami penurunan 21 orang (2004), 17 orang (2005) dan 14 orang (2006).
- b. demikian halnya untuk Angka Kematian Ibu (AKI), yang sangat berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas; Angka Kematian Ibu melahirkan di Kota Kendari, meskipun telah berada di bawah standar nasional, yakni 150 per 100.000 kelahiran hidup, masih cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2001 sebesar 4 orang dari sasaran 5239 kelahiran. Sedangkan pada tahun 2002 AKI mengalami penurunan menjadi 1 orang dari sasaran 5239



- kelahiran dan tahun 2003 kembali mengalami kenaikan menjadi 3 orang, tahun 2004 0 orang, tahun 2005 2 orang dan tahun 2006 0 orang. Masih berfluktuasinya Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan. Disamping itu kemampuan komunikasi antara masyarakat dengan tenaga medis dalam hal ini Bidan masih kurang. Hal ini tercermin dari pertolongan persalinan yang belum 100% di lakukan oleh tenaga kesehatan, meskipun pelayanan sudah mencakup seluruh kelurahan;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang meliputi: cakupan kunjungan Ibu Hamil (K1) sudah menunjukkan peningkatan. Sesuai data Dinas Kesehatan Kota Kendari pada tahun 2001 adalah 4071 jumlah kunjungan (77,10 %); tahun 2002, 4808 jumlah kunjungan (92,7 %); dan tahun 2003 adalah 5024 jumlah kunjungan (95,33 %). Sementara itu, cakupan kunjungan Ibu hamil (K4) menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2001 adalah 4952 kunjungan (94,52 %); tahun 2002 5040 jumlah kunjungan (97,27 %); dan tahun 2003, 4252 (80,68 %) dari jumlah sasaran 5270 kunjungan; tahun 2004, 5201 (78,54%); tahun 2005, 5319 (80,60%); tahun 2006, 5514 (82,45) dari jumlah sasaran 6688 kunjungan.
 - d. angka kesakitan beberapa penyakit menjadi ukuran masalah kesehatan di Kota Kendari. Angka kesakitan beberapa penyakit menular cenderung menurun seperti penyakit malaria, demam berdarah, rabies, Ispa dan diare. Sedangkan kasus penyakit TBC masih berfluktuasi. Angka Kesakitan penyakit TBC pada tahun 2001 adalah 11 kasus, tahun 2002, 62 kasus dan pada tahun 2003, 17 kasus;
 - e. kasus HIV / AIDS di Kota Kendari sampai saat ini terjadi 2 kasus; selain penyakit menular yang juga perlu diwaspadai yaitu timbulnya atau masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan



- menimbulkan korban seperti Ebola, Radang Otak, flu burung. Disamping itu beberapa penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup juga memperlihatkan kecenderungan meningkat. Masalah kesehatan remaja yang makin menonjol seperti penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) perlu mendapat perhatian;
- f. cakupan air bersih di Kota Kendari baru mencapai 66,6 % pada tahun 2001 sedangkan pada tahun 2003 telah mencapai 76,6 %. Dan pada tahun 2006 cakupan air bersih telah mencapai 91,5%; hal ini telah melampaui dari data Indonesia Sehat 2010, dimana target keluarga yang memiliki akses terhadap Air Bersih 85 %;
 - g. cakupan jamban keluarga di Kota Kendari untuk tahun 2001 adalah 73 %, pada tahun 2002, 74 % sedangkan tahun 2003, 75 % dan pada tahun 2006 telah mencapai 79,83%. Dilihat dari data per tahunnya cakupan jamban keluarga terus mengalami peningkatan, sebab target nasional pada tahun 2010 sebesar 75 % untuk daerah perkotaan telah terpenuhi;
 - h. dari segi kelembagaan dan pelayanan kesehatan saat ini di Kota Kendari terdapat 2 rumah sakit pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Prop. Sultra dan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari. Sedangkan rumah sakit Militer/Polri terdapat 2 rumah sakit yakni Rumah sakit Dr. Ismoyo dan Rumah sakit Bhayangkara. Disamping itu terdapat pula Rumah sakit swasta lainnya yaitu: Rumah sakit Griya Husada Bakti dan Rumah sakit Santa Anna. Rumah sakit bersalin yang ada di Kota Kendari sebanyak 3 rumah sakit yaitu: Rs. Kasih Ibu, Rs. Permata Bunda dan Rs. Dewi Sartika, diakui bahwa ketersediaan dokter spesialis, masih menjadi kendala peningkatan optimalitas pelayanan rumah sakit; dan
 - i. keberadaan Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling di Kota Kendari juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk



mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah puskesmas rawat jalan sebanyak 9 buah, 1 merupakan puskesmas rawat inap dan 3 buah masih dalam tahap persiapan. Selain itu terdapat 10 buah puskesmas keliling dan 6 Bakesra yang dalam tahap pembentukan. Puskesmas Pembantu yang ada sebanyak 16 buah dan 160 Pos yandu. Puskesmas tersebut tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Kendari. Namun demikian persebaran jumlah sarana tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan di setiap jenjang yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor penting untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan adalah ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai dalam menentukan keberhasilan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan.

4) Belum Optimalnya Penanganan Pendidikan Dasar dan Menengah

Mengawali orde otonomi daerah, pendidikan di daerah termasuk Kota Kendari menghadapi tiga tantangan besar, yakni : (1) sebagai akibat krisis ekonomi yang belum pulih, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global; (3) dengan semangat otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Masalah pendidikan dasar dan menengah di Kota Kendari tidak berbeda jauh dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Masalah tersebut dapat diidentifikasi



sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemerataan memperoleh pendidikan dimana angka partisipasi sekolah penduduk Kota Kendari tahun 2005 pada usia 7-12 tahun sebesar 98,4 %, dan pada usia 13-15 tahun sebesar 90,1 %, dan pada usia 16-18 tahun sebesar 75,8 %; sementara itu tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang berumur 10 tahun keatas tahun 2005 tercatat tidak tamat SD 13,82 %, tamat SD 18,40%, tamat SLTP 19,18 %, tamat SMU 31,95 % dan Diploma ke atas 3,17 %; dan penduduk yang melek huruf pada tahun 2005 tercatat 96,8 %;
- b. masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dimana masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah kecamatan, antar kelurahan, antar tingkat pendapatan penduduk dan gender;
- c. kemudian kondisi umum kualitas pendidikan di Indonesia yang masih memprihatinkan juga menjadi kondisi pendidikan di Kota Kendari. Hal tersebut tercermin antara lain dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke 39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada uruan ke 40 dari 42 negara peserta. Namun demikian pada tahun 2004 kita cukup berbangga atas prestasi yang dapat diukir oleh beberapa siswa SMU atas keberhasilannya mendapat hadiah nobel junior fisika internasional.



Tabel 2.25.
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
untuk Semua
Jenjang Pendidikan Se-Kota Kendari Tahun 2006 - 2007

a. APK dan APM Tingkat TK dan SD

No.	Kecamatan)*	APK Tingkat TK	APK Tingkat SD		APM Tingkat SD	
			Termasuk Paket A	Tdk. Terma suk Paket A	Termasuk Paket A	Tdk. Terma suk Paket A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kendari	23.49	98.92	98.33	83.16	83.01
2.	Mandongga	34.86	80.99	80.32	68.88	68.75
3.	Poasia	31.04	94.52	94.11	77.26	77.13
4.	Baruga	83.22	103.75	103.54	88.84	88.77
5.	Abeli	44.62	95.27	93.88	79.30	78.85
6.	Kendari Barat	75.06	100.97	100.64	85.23	85.10
<i>Rata-rata</i>		<i>48.28</i>	<i>95.12</i>	<i>94.61</i>	<i>80.29</i>	<i>80.14</i>

b. APK dan APM Tingkat SMP

No.	Kecamatan)*	APK Tingkat SMP		APM Tingkat SMP	
		Termasuk Paket B	Tidak Termasuk Paket B	Termasuk Paket B	Tidak Termasuk Paket B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kendari	32.36	30.39	21.18	20.81
2.	Mandongga	38.24	36.00	31.02	30.62
3.	Poasia	50.41	48.50	39.97	39.49
4.	Baruga	54.47	53.93	41.89	41.77
5.	Abeli	62.10	60.04	44.22	43.76
6.	Kendari Barat	61.86	60.17	53.50	53.29
<i>Rata-Rata</i>		<i>48.87</i>	<i>47.27</i>	<i>38.31</i>	<i>38.01</i>



c. APK dan APM Tingkat SMA

No.	Kecamatan) *	APK Tingkat SM		APM Tingkat SM	
		Termasuk Paket B	Tidak Termasuk Paket B	Termasuk Paket B	Tidak Termasuk Paket B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kendari	52.37	52.37	36.60	36.60
2.	Mandongga	41.64	40.64	26.43	26.23
3.	Poasia	31.60	31.60	23.37	23.37
4.	Baruga	457.50	456.62	215.32	215.10
5.	Abeli	31.37	31.37	20.33	20.33
6.	Kendari Barat	131.76	130.40	99.42	99.15
<i>Rata-rata</i>		<i>112.07</i>	<i>111.47</i>	<i>64.99</i>	<i>64.86</i>

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari, Tahun 2008

)* Data kecamatan pemekaran masih bergabung dengan data pada kecamatan induk.

5) Kerawanan, Keamanan Dan Ketertiban

Meskipun pada beberapa tahun terakhir, Kota Kendari masih tergolong klasifikasi daerah 'aman', dilihat dari aspek konflik sosial, khususnya sosial, agama, ras dan antar golongan, namun implikasi eskalasi konflik dapat menjadi potensi ancaman, apalagi Kota Kendari merupakan salah satu penerima korban konflik (eksodus).

Disamping itu, potensi konflik internal juga masih eksis, diantaranya masalah kebijaksanaan alokasi sumberdaya ekonomi, yang dianggap berpihak dan tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan sebagainya, hingga masalah-masalah kekurangtertiban pada penggunaan fasilitas publik. Secara umum, potensi yang dapat menimbulkan kerawanan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kendari adalah:



- a. masih ada kesan 'pilih kasih' dalam penegakkan peraturan, dikhawatirkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, yang akan berujung pada kecenderungan penghakiman massa dan konflik horisontal; dan
- b. berkaitan dengan masalah ketertiban; masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap penggunaan fasilitas- fasilitas publik seperti:
 - Kesadaran dalam menciptakan suasana aman dan tertib di pasar atau tempat keramaian lainnya
 - Kesadaran penertiban bangunan
 - Penggunaan angkutan umum
 - Pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan
 - Masih rendahnya atau kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan suasana tertib dilingkungannya.

6) Penegakan Hukum

Aspek penegakkan hukum dan Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar utama bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kota Kendari dalam aspek ini masih mengalami beberapa kelemahan utamanya:

- a. Masih adanya beberapa peraturan daerah, yang penerapannya belum konsisten, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum;
- b. Masih adanya pilih kasih penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah antara penyelenggara/ aparat dengan masyarakat;
- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami/sadar tentang hukum dan Peraturan Daerah;
- d. Belum adanya atau belum dioptimalkannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum yang didukung oleh teknologi informasi. Hal ini



merupakan kendala dalam mendukung penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

7) Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran.

Sejak dimulainya krisis moneter yang menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 berdampak besar pada semua sektor ekonomi yang hingga hari ini belum stabil 100 persen, Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis, tahun 1996 tercatat 14,14 %, namun selama krisis ekonomi sampai dengan sekarang pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai diatas 10 persen, apalagi ditambah dengan kenaikan bahan Bakar Minyak (BBM) beban yang harus dipikul masyarakat semakin berat. Dari kenyataan tersebut di atas, implikasi penurunan kinerja perekonomian nasional juga berdampak luas di daerah, salah satunya adalah semakin bertambahnya jumlah keluarga miskin. Di kota Kendari, meskipun menunjukkan indikasi keluarga miskin yang menurun, yakni pada tahun 2002 tercatat 17.087 KK atau 48,86%, kemudian menjadi 37,3% pada tahun 2003 dan pada tahun 2007 keluarga miskin tercatat sebesar 33,80 persen, namun karena masih kurangnya kesempatan dan perlindungan usaha bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka dikhawatirkan kecenderungan penurunan tersebut bisa berubah.

Dari sisi angkatan kerja, setiap tahunnya bertambah, sementara tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Jumlah angkatan kerja di Kota Kendari tahun 2002 mencapai 48,50 % sedangkan tingkat pengangguran tahun 2002 tercatat 14,7 % dan pada tahun 2004 tingkat pengangguran meningkat menjadi 20,60 persen dari total jumlah angkatan kerja. Sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja seperti pertanian (primer) telah mengalami transformasi ke sektor jasa/tersier. Dalam PDRB tahun 2007 tercatat bahwa sektor pengangkutan



dan komunikasi menempati kontribusi tertinggi yaitu 25,68 % disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran 19,67 perses dan pertanian 17,18 % yang pada tahun-tahun sebelumnya menempati urutan tertinggi. Disamping itu, areal pertanian yang semakin berkurang dalam setiap tahun akibat alih fungsi menjadi permukiman atau peruntukan lain, adalah tantangan ke depan jika mengandalkan sektor ini sebagai sektor penggerak perekonomian kota. Disamping itu, produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Kendari selain mengalami panen yang tidak optimal juga belum diolah di Kota Kendari melainkan diperdagangkan antar pulau yakni ke Makassar dan Surabaya sehingga tenaga kerja dan nilai tambah tidak banyak yang terserap pada sektor ini.

8) Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Dalam hal penataan kelembagaan, Pemkot Kendari terus berupaya mengefisienkan struktur organisasi menuju pola optimal, yang sejalan dengan upaya-upaya peningkatan sumberdaya aparatur. Namun hingga saat ini masih ditemukan beberapa hal kelemahan sebagai berikut:

- a. Meski Pemerintah kota telah mengacu pada pola struktur yang optimal dan efisien seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, masih ditemui tumpang tindih dan ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), hal ini dikarenakan masih adanya ketidak pahaman aparat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. munculnya beberapa kasus-kasus penyelewengan tugas dan tanggung jawab seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) aparat, yang sedikit



banyak mempengaruhi kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota.

C. Prioritas Daerah

Berpijak pada orientasi jangka panjang pembangunan Kota Kendari, seperti yang tertuang dalam Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari 2020 seperti yang diuraikan diatas, yang kemudian diselaraskan dengan Agenda Nasional dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), maka sebagai upaya penanganan isu-isu pokok yang dikemukakan sebelumnya, ditetapkan delapan prioritas daerah, sebagai berikut.

- i. Kelestarian dan Keserasian lingkungan
- ii. Mengembangkan kapasitas Pelayanan Prasarana Dasar Perkotaan
- iii. Meningkatkan Derajat Kesehatan
- iv. Memantapkan Pendidikan Dasar dan Menengah
- v. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
- vi. Mewujudkan Penegakkan Supremasi Hukum
- vii. Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
- viii. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Untuk memberikan fokus bagi pencapaian misi yang diemban, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dengan berpedoman pada prioritas daerah diuraikan sebagai berikut:



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2006

Tujuan 1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.		
	Sasaran : 1.1	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	
	Sasaran : 1.2	Meningkatnya pemanfaatan SDA dan LH melalui konservasi rehabilitasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	
	Sasaran: 1.3	Meningkatnya pengelolaan SDA, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Abiotik, Biotik, Kesehatan Masyarakat dan Sosial Budaya).	
Sasaran	1.4.	Terlaksananya pengendalian pengawasan pertambangan dan energi	
Tujuan 2	Meningkatkan fungsi Kota Kendari sebagai kota pelayanan skala regional dan terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat.		
	Sasaran : 2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.	
	Sasaran : 2.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan sistem transportasi darat dan laut.	
	Sasaran : 2.3	Meningkatnya kualitas bangunan, lingkungan permukiman dan perkotaan	
		2.4	Menigkatnya Kualitas pelayanan Perizinan, penanaman modal, pertambangan dan energi.
Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan visi Indonesia sehat 2010.		
	Sasaran : 3.1	Meningkatnya fasilitas maupun pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
	Sasaran : 3.2	Meningkatnya kualitas SDM petugas kesehatan.	
	Sasaran : 3.3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.	
Tujuan 4	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan dasar dan menengah serta pelestarian nilai-nilai budaya.		
	Sasaran : 4.1	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah.	



	Sasaran : 4.2	Meningkatnya pembinaan pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
	Sasaran : 4.3	Meningkatnya kualitas SDM tenaga kependidikan
	Sasaran : 4.4	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan
	Sasaran : 4.5	Lestarnya dan berkembangnya kebudayaan daerah dalam rangka memperkuat identitas dan jatidiri.
Tujuan 5	Meningkatkan rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh warga masyarakat.	
	Sasaran : 5.1	Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan dan hubungan komunikasi yang harmonis antar umat beragama dan antar golongan
	Sasaran : 5.2	Meningkatnya sistim keamanan lingkungan yang berbasis potensi masyarakat dan aparat.
	Sasaran : 5.3	Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung keindahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
	Sasaran : 5.4	Terselenggaranya sistim administrasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.
Tujuan 6	Menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penegakan supremasi hukum.	
	Sasaran : 6.1	Meningkatnya kualitas SDM penyusun Perda dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah serta peraturan lainnya.
	Sasaran : 6.2	Makin berfungsinya lembaga kemasyarakatan yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
	Sasaran : 6.3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
	Sasaran : 6.4	Terselenggaranya sistim perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
	Sasaran : 6.5	Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja.
	Sasaran : 6.6	Terselenggaranya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
	Sasaran : 6.7	Meningkatnya integritas moral dan profesional aparat penegak hukum/Peraturan Daerah (PPNS) untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat



Tujuan 7	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.	
	Sasaran :	7.1 Tersedianya areal pertanian dan hasil pertanian yang berkualitas dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kendari.
	Sasaran :	7.2 Bertambahnya kuantitas dan kualitas industri, jasa, perdagangan, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan.
	Sasaran :	7.3 Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta jaminan kesejahteraan sosial.
	Sasaran :	7.4 Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan pengembangan lembaga usaha, tenaga kerja dan konsumen.
	Sasaran	7.5. Makin berkurangnya jumlah penduduk miskin
	Sasaran	7.6. Tersedianya barang pokok dan barang strategi serta stabilitas harga
	Sasaran	7.7. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Tujuan 8	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah.	
	Sasaran :	8.1 Meningkatnya sarana prasarana dan penunjang pelaksanaan tugas DPRD.
	Sasaran :	8.2 Terbentuknya organisasi pemerintah kota yang efektif dan efisien.
	Sasaran :	8.3 Terlaksananya sistem kaderisasi dan peningkatan sumber daya aparatur serta mekanisme penjurangan karir secara obyektif, prosedural, dan prestatif.
	Sasaran :	8.4 Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah di semua sektor.
	Sasaran :	8.5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan.



Sejak Tahun Anggaran 2003-2006, prioritas-prioritas pembangunan tersebut diklasifikasikan dalam prioritas pokok dan penunjang, berdasarkan program alokasi anggaran pada setiap tahunnya, dalam tabel dibawah ini digambarkan prioritas alokasi anggaran mulai tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006.

Tabel 2.2 : Prioritas Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007

PRIORITAS	PROSENTASE ANGGARAN			
	2004	2005	2006	2007
I. Prioritas Pokok				
1. Mengembangkan kapasitas pelayanan prasarana dasar perkotaan.	37,09	35,09	22,83	23,6
2. Memantapkan pendidikan dasar dan menengah.	10,71	11,19	14,22	14,89
3. Meningkatkan derajat kesehatan.	4,76	6,43	15,16	8,78
4. Memantapkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah.	27,29	16,96	17,80	28,83
5. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah, penanganan kemiskinan dan pengangguran.	6,65	18,56	17,84	12,81
II. Prioritas Penunjang				
1. Kelestarian dan keserasian lingkungan.	8,92	5,57	5,81	7,73
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum.	4,36	1,27	5,26	1,69
3. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban.	0,24	4,97	1,07	1,67
	100	100	100	100

Dari arah prioritas pembangunan tersebut di atas Pemerintah Kota, untuk tahun 2007 secara konsisten akan memberikan prioritas penanganan, sebagaimana yang telah dilakukan tahun 2006, 2007.



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan satu tahun. Didalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Kendari merupakan akumulasi RKT dari masing-masing unit kerja se-Kota Kendari. RKT tersebut memuat informasi tentang:

1. **Sasaran** yang ingin dicapai ditahun yang bersangkutan sebagaimana yang dimuat pada dokumen Renstra.

Dalam menetapkan sasaran RKT dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya (targetnya).

2. **Program** yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu sebagaimana yang ditetapkan.

Program yang dimaksud adalah program-program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. **Kegiatan**

Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan *indikator kinerja* dan rencana capainnya.

Indikator kinerja yang dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran



kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja yang dicantumkan didalam LKPJ Walikota Kendari TA 2007 meliputi: (a) **Input**, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output; (b) **Ouput**, yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan (c) **Outcome**, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Penetapan Indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.